TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v6i1.7983

ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI PENERIMA BANTUAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA DI NAGARI PILUBANG KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Socio-Economic Conditions of Recipients of Kartu Keluarga Sejahtera Assistance in Nagari Pilubang, Sungai Limau District, Padang Pariaman Regency

Putri Rahayu & Sri Mariya
Universitas Negeri Padang
putrirahayukoto01@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Oct 12, 2025	Nov 2, 2025	Nov 14, 2025	Nov 19, 2025

Abstract

This study is motivated by the limited research on the socioeconomic conditions of recipients of the *Kartu Keluarga Sejahtera* (KKS; Prosperous Family Card) in Nagari Pilubang, Sungai Limau District, Padang Pariaman Regency, despite the significant implications of this phenomenon for the effectiveness of KKS as an instrument of poverty alleviation. The study aims to describe the conditions of income, fulfillment of basic needs, health, and education among KKS beneficiary households in Nagari Pilubang. A descriptive quantitative design was employed with a population comprising all 691 KKS recipients, from which a sample of 87 respondents was determined using the Slovin formula and selected through proportional random sampling. Data were

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

collected through questionnaires and documentation and analyzed using percentage techniques. The findings show that, in terms of income, household income levels of KKS recipients do not yet meet the expected criteria, although the types of employment of heads of households are in accordance with the categories stipulated by the program. The fulfillment of basic needs is considered to meet the criteria, as indicated by housing conditions (home ownership status, wall type, floor type, and water sources), clothing (purchase of clothing at least once a year), and food consumption (animal protein intake dominated by fish). Health conditions are also deemed to meet the criteria because most community members utilize primary health care (*puskesmas*) services through government-subsidized *BPJS* health insurance. In terms of education, the conditions of KKS recipients are aligned with program criteria, as the last educational level of heads of households and mothers is generally completed primary school or no schooling. Overall, the results indicate that although KKS recipients remain in the low-income category, their basic needs fulfillment, access to health services, and minimum educational conditions are consistent with KKS eligibility criteria, thereby providing input for local governments to improve targeting policies and design family empowerment programs for beneficiary households.

Keywords: Income Conditions; Basic Needs; Prosperous Family Card (KKS); Health; Education

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya studi mengenai kondisi sosial ekonomi penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, padahal fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas penyaluran KKS sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pendapatan, pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan penerima bantuan KKS di Nagari Pilubang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan populasi seluruh penerima KKS berjumlah 691 orang, dan sampel sebanyak 87 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin serta diambil menggunakan teknik *proportional random sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan, tingkat pendapatan rumah tangga penerima KKS belum memenuhi kriteria yang diharapkan, meskipun jenis pekerjaan kepala keluarga telah sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok dinilai telah memenuhi kriteria, ditinjau dari kondisi tempat tinggal (status kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis lantai, dan sumber air), sandang (pembelian pakaian satu kali dalam setahun), dan pangan (konsumsi lauk pauk yang didominasi ikan). Kondisi kesehatan juga dinilai memenuhi kriteria karena sebagian besar masyarakat memanfaatkan layanan puskesmas dengan BPJS subsidi pemerintah. Pada aspek pendidikan, kondisi penerima KKS dinyatakan memenuhi kriteria program karena pendidikan terakhir kepala keluarga dan ibu umumnya pada jenjang tamat SD atau tidak sekolah. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun penerima KKS masih berada pada kategori pendapatan rendah, pemenuhan kebutuhan dasar, akses kesehatan, dan kondisi pendidikan minimal telah selaras dengan kriteria penerima KKS, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam perbaikan kebijakan penargetan dan program pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci: Kondisi Pendapatan; Kebutuhan Pokok; Kartu Keluarga Sejahtera; Kesehatan; Pendidikan

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara berkembang. Dimana salah satu ciri Negara berkembang diantaranya dilihat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia dihadapkan dengan masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Mubiyarto dalam (Ruswandi, Sunnarya, & Suwiryo, 2020) kemiskinan adalah keadaan kekurangan penduduk dalam bentuk pendapatan yang rendah, yang disebabkan oleh keterampilan, produktivitas, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik (Takaredase, Kaawoan, & Singkoh, 2019).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasr minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu: Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kemiskinan melalui bantuan social, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

Permasalahan yang terjadi diberbagai masyarakat, pemerintah mengambil jalan tengah untuk mangurangi permasalahan kemiskinan dengan adanya bantuan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan salah satu program pemerintah untuk percepatan dalam penanggulangan kemiskinan, Kartu Kelauarga Sejahtera awal dari hasil pengembangan program sebelumnya yang disebut dengan Katu Perlindungan Sosial. Tujuan dari program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah: 1) Membantu masyarakat miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 2) Menecegah penurunan taraf kesejahteraan mayarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, 3) Meningkatkan tanggung jawab social bersama.

Penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini telah menyeluruh ke berbagai provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota salah satunya Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman ini terdiri dari 17 Kecamatan salah satunya Kecamatan Sungai Limau, yaitu di Nagari Pilubang.

Masyarakat penerima bantuan KKS di lapangan ditemukan bahwa masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan sedangkan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu malah tidak mendapatkan bantuan tersebut. Untuk itu penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Tinjauan Literatur

Menurut Shadily dalam (Virgo, 2016) pendapatan merupakan sejumlah uang atau barang yang diterima sebagi hasil kerja yang telah dilakukan. Raharja dan Manurung dalam (Iskandar, 2017) bahwa pendapatan adalah total penerimaan berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu.

Rumah dalam keluarga berfungsi sebagai tempat tujuan bertemunya anggota keluarga; tempat membimbing dan mendidik anak, tempat berteduh, tempat berlindung, tempat beristirahat, tempat melakukan aktivitas keluarga, tempat memupuk keharmonisan keluarga, dan sebagainya (Kuswardinah, 2019).

Menurut (Kuswardinah, 2019) manusia memerlukan pakaian, disamping berfungsi untuk menutup aurat, juga untuk melindungi tubuh dari panas, dingin atau pengaruh alam yang lain. Pakaian juga difungsikan untuk pemenuhan etika dan estetika individu yang mengenakannya.

Menurut Buckle et, al. dalam (Zebua, Hadi, & Bakce, 2019) pangan adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Fungsi pangan yang paling utama adalah memenui kebutuhan gizi bagi tubuh. Pangan yang akan dikonsumsi selain menjadi kebutuhan pokok pangan juga dijadikan sebagai penunjang dalam mempertahankan kesehatan dan pemenuhan kebutuhab gizi. Sementara menurut (Hanjani, 1994) pangan adalah segala bahan yang bila dimakan atau masuk dalam tubuh akan membentuk atau menggantikan jaringan tubuh, memeberikan tempat atau mengatur semua proses dalam tubuh.

Menurut Sari dan Handayani (2025), kesehatan mencakup kemampuan literasi seseorang untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan guna mencapai kesejahteraan diri. Dengan demikian, kesehatan dapat dimaknai sebagai kondisi dinamis yang melibatkan keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta kemampuan adaptif individu dalam menjaga kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan.

Soesanto dalam (Rusadi, 2019) berpendapat bahwa melalui pendidikan bagi individu yang berasal dari masyarakat miskin terbukalah kesempatan baru untuk menemukan suatu lapangan baru yang memberikan hasil yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan hal penting dan mendasar dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan penduduk. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani manusia agar dapat menunjukkan kesempurnaan hidup.

Menurut Moscher 1983 dalam (Abd Kadir W, 2012) Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang, terutama dalam menganalisis suatu permasalahan. Seseorang yang berpendidikan baik akan mudah mengadopsi teknologi baru, mengembangkan keterampilan, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan variabel-variabel penelitian yang ada. Menurut (Yusuf, 2016) penelitian desktiptif adalah memberikan gambaran keadaan masa sekarang secara mendalam.

Menurut (Nana Sudjana, 2007) penelitian deskriptif kuantitatif digunakan apabila penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada saat penelitian, survey studi pengembangan informasi atau data yang dipakai antara lain pengamatan, angket dan wawancara.

Menurut (Arikunto, 2010) penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan pendapat diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data sebagaimana adanya tentang Kondisi Sosial Ekonomi penerima bantuan KKS di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Pilubang terdiri dari 8 korong, yaitu Korong Pasir Baru, Korong Lembak Pasang, Korong Kampung Jua, Korong Sungai Sirah, Korong Sibaruas, Korong Durian Daun, Korong Duku, dan Korong Pinjauan. Penelitian ini dilaksanakan selama lebih kurang satu bulan.

Partisipan & Teknik Sampling

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera yang ada di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau. Data diperoleh dari 8 Korong yang ada di Korong Lembak Pasang, Durian Daun, Sungai Sirah, Pasir Baru, Kampung Jua, Sibaruas, Duku, dan Pinjauan. Jumlah populasi penelitian ini adalah sebanyak 691 orang.

Sampel pada penelitian ini sebanyak 87 orang yang terdapat di 8 Korong di Nagari Pilubang, diantaranya 21 orang di Korong Duku, 14 orang di Korong Pasir Baru, 14 orang di Korong Pinjauan, 14 orang di Korong Sibaruas, 7 orang di Korong Sungai Sirah, 7 orang di Korong Lembak Pasang, 7 orang di Korong Durian Daun, dan 3 orang di Korong Kampung Jua. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah propotional random sampling yaitu teknik sampel yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi (Arikunto, 2010).

Instrumen & Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. Menurut (Sugiyono, 2013). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Analisis Data:

Menurut (Arikunto, 2006) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik persentase. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mentabulasikan jawaban responden. Mengolah data akhir, digunakan rumus statistik deskriptif berikut ini dengan formula:

$$P = \frac{\mathbf{f}}{\mathbf{n}} \times 100\%$$

Keterangan:
P : Presentase
F : Frekuensi (jumlah pilihan responden terhadap item)
n : Jumlah responden seluruhnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tentang Analisis Kondisi Sosial Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejatera di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau maka dilihatn dari kondisi sosial ekonomi penerima KKS antara lain:

1. Kondisi Pendapatan

a. Pendapatan

Tabel 1 Sumber Pendapatan Kepala Keluarga Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Pendapatan	F	%
1	Rp 300.000-Rp 600.000	6	6.90%
2	Rp 600.000-Rp 900.000	41	47.13%
3	Rp 900.000-Rp 1.000.000	30	34.48%
4	> Rp 1.500.000	10	11.49%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 2 Sumber Pendapatan Ibu Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Pendapatan	F	%
1	Rp 300.000-Rp 600.000	20	22.99%
2	Rp 600.000-Rp 900.000	3	3.45%
3	Rp 900.000-Rp 1.000.000	2	2.30%
4	Tidak Ada	62	71.26%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Pada tabel 1 hasil penelitian yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa pendapatan penerima bantuan KKS di Nagari Pilubang setiap kepala keluarga yang berpendapatan paling tinggi adalah Rp 600.000-Rp 900.000 sebanyak 41 orang (47.13%) dan pendapatan yang terendah adalah Rp 300.000-Rp 600.000 sebanyak 6 orang (6.90%). Pada tabel 2 Pendapatan ibu yang paling tinggi yaitu tidak ada sebanyak 62 orang (71.26%) dan pendapatan yang terendah adalah Rp 900.000-Rp 1.000.000 sebanyak 2 orang (2.30%).

Sesuai dengan pendapatan yang didapatkan oleh setiap kepala keluarga yang termasuk dalam kriteria penerima KKS yaitu sumber pengasilan kepala keluarga dibawah Rp 600.000 perbulan dan ibu tidak memiliki pekerjaan. Sedagkan pendapatan kepala keluarga penerima KKS adalah Rp 600.000-Rp 900.000 sebanyak 41 orang (47.13%). Dapat disimpulkan bawa kriteria penerima KKS berdasarkan kondisi pendapatan masyarakat tidak memenuhi kriteria penerima KKS.

b. Pekerjaan

Tabel 3 Pekerjaan Kepala Keluarga Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Pekerjaan	F	%
1	Petani	60	68.97%
2	Pedagang	3	3.45%
3	Nelayan	14	16.09%
4	Lainnya	10	11.49%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Sekunder 2023

Berdasarkan tabel diatas pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepala keluarga pada umumnya bekerja sebagai petani sebanyak 60 orang (68,97%), pedagang sebanyak 3 orang (3,45%), nelayan sebanyak 14 orang (16,09%),

dan lainnya (serabutan) sebanyak 10 orang (11,49%). Sesuai dengan kriteria penerima KKS jenis pekerjaan yaitu petani, serabutan, dan nelayan sebanyak 84 responden (96.55%). Kriteria penerima KKS dilihat dari persentase responden pekerjaan penerima KKS sudah memenuhi kriteria.

c. Kepemilikan Barang Berharga

Tabel 4 Barang Berharga Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Barang Berharga	F	%
1	TV	51	58.62%
2	TV, kulkas	18	20.69%
3	Kulkas	6	6.90%
4	Tidak ada	12	13.79%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan tabel di atas kepemilikan barang berharga penerima KKS di Nagari Pilubang terdapat 87 responden dengan 8 korong. Keluarga yang hanya memiliki TV sebanyak 51 orang (58.62%), yang memiliki TV dan kulkas sebanyak 18 orang (20.69%), yang hanya memilki kulkas sebanyak 6 orang (6.90%) dan tidak ada memiliki barang berharga sebnayak 12 orang (13.79%).

d. Tabungan

Tabel 5 Tabungan Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Tabungan	F	%
1	> Rp 5,000,000	7	8.05%
2	Rp 1,000,000-5,000,000	12	13.79%
3	Rp 1.000.000	29	33.33%
4	Tidak memiliki	39	44.83%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan tabel diatas Jumlah tabungan yang dimiliki penerima KKS dari hasil penelitian di lapangan adalah Jumlah tabungan berupa uang penerima KKS di Nagari Pilubang terdapat 87 responden dengan 8 korong. Tabungan lebih dari Rp 5.000.000 sebanyak 7 orang (8.05%), tabungan Rp 1.000.000-5.000.000 sebanyak 12 orang (13.79%), tabungan Rp 1.000.000 sebanyak 29 orang (33.33%), dan yang tidak memiliki tabungan

sebanyak 39 orang (44.83%). Sesuai dengan kriteria penerima KKS bahwa tidak memiliki Tabungan sebanyak 44.83%.

2. Kondisi Pemenuhan Kebutuhan Pokok

a. Tempat Tinggal (Papan)

Tabel 6 Status Kepemilikan Rumah Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Status Kepemilikan Rumah	F	%
1	Milik Sendiri	32	36.78%
2	Warisan Orangtua	47	54.02%
3	Ngontrak/Sewa	5	5.75%
4	Menumpang	3	3.45%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 7 Jenis Rumah Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Jenis Rumah	F	%
1	Permanen	55	63.22%
2	Semi permanen	30	34.48%
3	Kayu	2	2.30%
4	Bambu	0	0.00%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 8 Jenis Dinding Rumah Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Dinding Rumah	F	%
1	Tembok	59	67.82%
2	Batu	0	0.00%
3	Kayu	6	6.90%
4	Triplek	22	25.29%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 9 Jenis Lantai Rumah Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Jenis Lantai	F	%
1	Keramik	18	20.69%
2	Semen	68	78.16%
3	Papan	0	0.00%
4	Tanah	1	1.15%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 10 Luas Bangunan Tempat Tinggal Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Luas Bangunan	F	%
1	> 40 m²	2	2.30%
2	31 m² - 40 m²	18	20.69%
3	20 m² - 30 m²	42	48.28%
4	< 20 m²	25	28.74%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Pada tabel 6 berdasarkan dari hasil penelitian bahwa status kepemilikan rumah penerima KKS yang paling banyak yaitu warisan orangtua sebanyak 47 responden (54.02%), pada tabel 7 jenis rumah penerima KKS yang paling banyak yaitu permanen sebanyak 55 responden (63.22%), jumlah kamar penerima KKS terbanyak yaitu memiliki 2 kamar sebanyak 46 responden (52.87%), pada tabel 8 jenis dinding rumah penerima KKS yang paling banyak adalah tembok sebanyak 59 responden (67.82%), pada tabel 9 kondisi lantai rumah penerima KKS terbanyak yaitu semen sebanyak 68 responden (78.16%), pada tabel 10 luas bangunan tempat tinggal terbanyak adalah dengan luas bangunan 20 m² - 30 m² sebanyak 42 responden (48.28%), bahan bakar memasak yang paling banyak adalah gas subsidi sebanyak 42 responden (48.28%), sumber MCK penerima KKS yang paling banyak yaitu WC pribadi sebanyak 56 responden (64.37%), dan sumber air minum penerima KKS terbanyak yaitu sumur sebanyak 74 responden (85.06%).

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima KKS dilihat dari kondisi tempat tinggal yang sudah memenuhi kriteria yaitu dilihat dari status kepemilikan rumah, jenis lantai rumah, dan sumber daya air sedangkan yamg tidak memenuhi kriteria yaitu sumber penerangan rumah semuanya sudah menggunakan listrik, jenis dinding rumah rata-

rata menggunakan tembok, luas bangunan tempat tinggal banyak diatas 20 m², bahan bakar memasak sudah banyak yang menggunakan kompor gas dan sumber MCK banyak dilakukan di WC pribadi.

b. Kondisi Sandang (Pakaian)

Tabel 11 Frekuensi Beli Pakaian Setahun Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Frekuensi Beli Pakaian	F	%
1	Lebih Dari 3 kali	1	1.15%
2	3 kali	3	3.45%
3	2 kali	31	35.63%
4	1 kali	52	59.77%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 12 Banyak Beli Pakaian Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Banyak Beli Pakaian	F	%
1	>5 stel	0	0.00%
2	4 stel	2	2.30%
3	3 stel	7	8.05%
4	2 stel	78	89.66%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kondisi sandang penerima bantuan KKS di Nagari Pilubang. Hal ini dilihat pada tabel 11 dari frekuensi beli pakaian dalam setahun. Dari hasil penelitian ditemukan pada umumnya keluarga hanya satu kali beli pakaian dalam setahun sebanyak 52 responden (59.77%), pada tabel 12 banyak pakaian yang di beli dalam setahun dominan < 2 stel sebanyak 78% (89.66%). Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima KKS dilihat dari kondisi sandang sudah memenuhi kriteria karena masyarakat membeli pakaian hanya satu kali dalam setahun dengan banyak pakaian yang dibeli <2 stel.

c. Kondisi Pangan (Makanan)

Tabel 13 Jenis Lauk Pauk Konsumsi Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Jenis Lauk Pauk	F	%
1	Daging Sapi	0	0.00%
2	Daging ayam	32	36.78%
3	Ikan	40	45.98%
4	Lainnya	15	17.24%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Tabel 14 Frekuensi Makan dalam Sehari Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Frekensi Makan Sehari	F	%
1	> 3 kali	3	3.45%
2	3 kali	27	31.03%
3	2 kali	57	65.52%
4	1 kali	0	0.00%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Hasil penelitian tentang kondisi pangan penerima KKS di Nagari Pilubang diperoleh hasil bahwa, makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarga adalah beras. Pada tabel 13 Jenis lauk pauk yang sering di konsumsi keluarga penerima KKS terbanyak adalah ikan sebanyak 40 responden (45.98%). Pada tabel 14 Frekuensi makan dalam sehari umumnya 2 kali sehari sebanyak 57 responden (65.52%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima KKS dilihat dari kondisi pangan sudah memenuhi kriteria karena masyarakat penerima KKS jenis lauk pauk yang sering dikonsumsi adalah ikan dan frekuensi makan dalam sehari sudah memenuhi kriteria karena masyarakat penerima KKS makan dalam sehari dua kali.

3. Kondisi Kesehatan

Tabel 15 Tempat Berobat Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Tempat Berobat	F	%
1	Rumah Sakit	5	5.75%
2	Puskesmas	57	65.52%
3	Bidan	16	18.39%
4	Lainnya (Tradisional)	9	10.34%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, kondisi kesehatan dilihat dari tempat berobat dan beli obat penerima KKS bahwa keluarga yang berobat terbanyak yaitu ke Puskesmas sebanyak 57 responden (65.52%), rumah sakit sebanyak 5 responden (5.75%), bidan sebanyak 16 responden (18.39%), dan pengobatan tradisional sebanyak 9 responden (10.34%). Jadi dapat disimpulkan kriteria penerima KKS dilihat dari kondisi kesehatan sudah memenuhi kriteria karena masyarakat banyak berobat di puskesmas dengan menggunakan BPJS subsidi pemerintah.

4. Kondisi Pendidikan

a. Tingkat pendidikan Kepala Keluarga

Tabel 16 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Tingkat Pendidikan	F	%
1	SMA	15	17.24%
2	SMP	29	33.33%
3	SD	36	41.38%
4	Tidak Sekolah	7	8.05%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan kondisi pendidikan responden tergolong rendah. Hal ini dibuktikan pada tabel 16 dengan pendidikan kepala keluarga bersekolah hanya sampai pada tingkat SD sebanyak 36 responden (41.38%) dan tidak sekolah sebanyak 7 responden (8.05%). Dapat disimpulkan bahwa kriteria penerima KKS dilihat dari kondisi pendidikan terakhir kepala keluarga masyarakat penerima KKS

sudah memenuhi kriteria, karena pendidikan terakhir kepala keluarga paling banyak di tingkat Sekolah Dasar (SD).

b. Tingkat Pendidikan Terakhir Ibu

Tabel 17 Tingkat Pendidikan Ibu Penerima KKS di Nagari Pilubang

No	Tingkat Pendidikan	F	%
1	SMA	19	21.84%
2	SMP	30	34.48%
3	SD	34	39.08%
4	Tidak Sekolah	4	4.60%
Jumlah		87	100.00%

Sumber: Pengolahan Data Primer 2023

Berdasarkan tabel di atas penelitian yang dilakukan dilapangan terhadap 87 responden diperoleh hasil penelitian mengenai pendidikan terakhir ibu, yaitu pada tingkat pendidikan SMA sebanyak 19 responden (21.84%), tingkat pendidikan SMP sebanyak 30 responden (34.48%), tingkat pendidikan SD sebanyak 34 responden (39.08%), dan tidak sekolah sebanyak 4 responden (4.60%).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera di Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman" dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi pendapatan penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) berdasarkan kondisi pendapatan masyarakat tidak memenuhi kriteria penerima KKS karena pendapatan kepala keluarga berada di angka Rp 600.000-Rp 900.000 sedangkan untuk kriteria penerima KKS pendapatan Kepala Keluarga kurang dari Rp 600.000 dan berdasarkan pekerjaan sudah memenuhi kriteria karena jenis pekerjaan yaitu petani, serabutan, pedagang, dan nelayan sebanyak 96.55%.
2. Kondisi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat penerima KKS berdasarkan kondisi papan (tempat tinggal) yang sudah memenuhi kriteria yaitu dilihat dari status kepemilikan rumah, jenis dinding rumah, jenis lantai rumah, dan sumber daya air sedangkan yang tidak memenuhi kriteria yaitu sumber penerangan rumah semuanya sudah menggunakan listrik, luas bangunan tempat tinggal banyak diatas 20 m^2, bahan bakar memasak sudah banyak yang

menggunakan kompor gas dan sumber MCK banyak dilakukan di WC pribadi. Berdasarkan kondisi sandang (pakaian) sudah memenuhi kriteria karena hanya membeli pakaian satu kali dalam setahun. Berdasarkan kondisi pangan (makanan) sudah memenuhi kriteria karena masyarakat jenis lauk pauk ikan dikonsumsi paling banyak.

3. Kondisi kesehatan masyarakat penerima KKS sudah memenuhi kriteria karena masyarakat banyak berobat ke puskesmas dengan persentase sebanyak 65.52%, dan tempat beli obat banyak ke Puskesmas dengan persentase sebanyak65.52% menggunakan BPJS subsisdi pemerintah.

4. Kondisi pendidikan masyarakat penerima KKS sudah memenuhi kriteria karena pendidikan terakhir kepala keluarga adalah SD atau tidak sekolah dan pendidikan terakhir Ibu adalah tamatan SD dan Tidak sekolah. Jumlah anak Berdasarkan hasil penelitian di lapangan jumlah anak terbanyak di Nagari Pilubang yaitu jumlah anak lebih dari 4 orang sebanyak 56 responden (64.37%), jumlah anak 3 orang sebanyak 25 responden (28.74%).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah mengenai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan pengecekan ulang kelapangan setelah menerima data calon penerima KKS supaya pemberian dana dilakukan tepat sasaran.

2. Diharapkan dalam proses pendataan penerima Kartu Keluarga Sejahtera, hendaknya melibatkan pemerintah setempat dengan perlu tekat yang kuat bagi semua pihak kerjasama dan komitmen memberantas kemeiskinan dan lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan program Kartu Keluarga Sejahtera dengan benarbenar pendataan yang objektif, sehingga tidak adanya pemilihan Rumah Tangga Miskin (RTM) secara subjektif dan program bantuan KKS ini bisa tepat sasaran pada masyarakat miskin dan tidak ada lagi kecemburuan sosial di masyarakat.

3. Bagi masyarakat khususnya penerima KKS, diharapkan untuk lebih giat lagi dalam bekerja agar dapat meningkatkan pendapatan dan mengembangkan ekonomi kreatif seperti beternak sapi dan kerbau, membuat makanan kecil yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh agar dapat menambah pendapatan dan hubungan keakraban sesama penerima KKS.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Kadir W, S. A. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan, XIX*(1), 1-11.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Nana Sudjana, I. (2007). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan.* Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Ruswandi, I., Sunnarya, E., & Suwiryo, D. H. (2020). Implementation Of The Hope Family Program Policy at Purabaya Dictrict Sukabumi West Java. *International Journal of Multi Science, I*(5), 14-28.

Sari, D. M., & Handayani, R. (2025). Well-being and health literacy in Indonesian communities. Jurnal Kesehatan Masyarakat Digital, 7(1), 1–10.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, III*(3), 1-11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Gabungan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.